



Judul : Banggar DPR Diyakini Tahu Kasus Sudiartana
Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Banggar DPR Diyakini Tahu Kasus Sudiartana

[SUKABUMI] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intens mengorek keterangan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam mengusut kasus dugaan suap pemulusan rencana pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat dalam APBN-P2016. Para anggota Banggar itu diyakini mengetahui kasus suap yang telah menjerat Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana itu.

"Penyidik mau mengetahui lebih banyak *background* peristiwa itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara *media gathering* di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (20/8).

Namun, Agus belum dapat memastikan keterlibatan Banggar DPR dalam kasus ini. Dikatakan, pihaknya belum mendapat hasil pemeriksaan terhadap Banggar DPR ini.

"Saya belum ada laporan terakhir dari penyidik," katanya.

Diketahui, dalam mengusut kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah anggota Banggar DPR. Pada Jumat (19/8) penyidik memeriksa Anggota Banggar dan juga Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti. Sehari sebelumnya, penyidik juga memeriksa Anggota Banggar yang juga Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Putu, dan staf khususnya bernama Novianti, serta seorang per-

antara, bernama Suhemi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara pengusaha yang juga fungsionaris Partai Demokrat di Sumbar bernama Yogan Askan dan Kadis Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat, Suprpto ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

Rekening

Putu disangka menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Yogan dan Suprpto untuk memuluskan rencana proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang menghabiskan anggaran Rp 300 miliar agar dapat didanai APBN-P2016. Uang suap itu dikirim Yogan dan Suprpto melalui tiga rekening berbeda, salah satunya milik keponakan Putu yang bernama Ni Luh Sugiani dengan jumlah pengiriman masing-masing Rp 150 juta, Rp 300 juta, dan Rp 50 juta. Selain itu, saat menangkap Putu di rumah dinas di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, Tim Satgas KPK juga turut menyita uang sebesar 40.000 Dollar Singapura.

Diduga, terdapat anggota DPR lain yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini lantaran sebagai Anggota Komisi III DPR yang berasal dari daerah pemilihan Bali, Sudiartana tidak memiliki kewenangan untuk membahas atau bahkan menjamin anggaran sebesar Rp 300 miliar itu dibiayai oleh APBN-P2016. Penetapan APBN-P yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembahasannya dilakukan oleh Banggar dan Kementerian Keuangan. [F-5]